

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN LPG DALAM RANGKA Mendukung
PROGRAM DIVERSIFIKASI ENERGI DI
KECAMATAN MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

RAHMAD ILHAMSYAH RAMBE

NPM: 140310017

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Lengkap : **RAHMAD ILHAMSYAH RAMBE**
N P M : 1403100107
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG DALAM RANGKA Mendukung Program Diversifikasi Energi di Kecamatan Medan Timur**

Medan, 29 Maret 2018

Pembimbing


DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Dekan,


Dr. RUDIANTO, M.Si



BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **RAHMAD ILHAMSYAH RAMBE**

N P M : 1403100107

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pada hari, tanggal : Kamis, 29 Maret 2018

W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

(.....)

PENGUJI II : **Dr. ARIFIN SALEH, M.SP**

(.....)

PENGUJI III : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SP**

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua,

Dr. RUDANTO, M.Si



Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, RAHMAD ILHAMSYAH RAMBE, NPM 14031007, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,



RAHMAD ILHAMSYAH RAMBE



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mucntar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Rokmad Ikhamisyah Ramb
 NPM : 1403100107
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009
 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Dalam Rangka Mendukung Program
 Diversifikasi Energi di Kecamatan Medan Timur

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10 Feb 2018	Perbaikan Latar Belakang	
2.	12 Feb 2018	Perbaikan Uraian Teoritis	
3.	15 Feb 2018	Perbaikan Sistematisasi Uraian teoritis	
4.		Perbaikan Metode Penelitian	
5.	17 Feb 2018	Perbaikan Sistematisasi Penulisan metode Penelitian	
6.	19 Feb 2018	Perbaikan Draft Wawancara	
7.	20 Maret 2018	Perbaikan Bab IV Deskripsi Wawancara	
8.	22 Maret 2018	Perbaikcum Pembahasan	
9.	25 Maret 2018	Daftar Pustaka	

Medan, 26 Maret2018...

Dekan,

 Ruchando, M.Si

Ketua Program Studi,

 (Nani Khairiah, S.Pd, M.Pd)

Pembimbing ke :

 (Dedi Amalia, S.Soc.M.Si)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM DIVERSIFIKASI ENERGI DI KECAMATAN MEDAN TIMUR

RAHMAD ILHAMSYAH RAMBE
140310017

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG, merupakan peraturan yang dibuat oleh perintah untuk mengurangi pertumbuhan konsumsi energi fosil di Indonesia sebagai dampak langsung dari pertumbuhan ekonomi dan tuntutan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan membaik. Dengan dasar ini maka Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 ini sangat penting dalam mengubah pola penggunaan masyarakat terhadap minyak tanah menjadi bahan bakar gas dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar gas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG Dalam Rangka Mendukung Program Diversifikasi Energi Di Kecamatan Medan Timur apakah telah dijalankan dengan baik atau belum.

Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG Dalam Rangka Mendukung Program Diversifikasi Energi Di Kecamatan Medan Timur sudah berjalan cukup baik sesuai dengan peraturan yang telah diatur namun belum maksimal. Berdasarkan adanya tujuan yang dicapai sudah terlaksana dengan baik namun belum maksimal yakni terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap gas lpg 3 kg pada proses distribusi namun terkadang masih ada kelangkaan gas LPG 3 kg. Pada pelaksanaan program, proses diversifikasi energi dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas berjalan dengan baik yang ditandai dengan antusias masyarakat dan konsistennya masyarakat dalam menggunakan gas LPG. Adanya target yang akan dicapai belum terlaksana dengan baik karena belum ratanya harga gas LPG 3 kg yang seharusnya untuk rakyat miskin yang diberi subsidi oleh pemerintah akan tetapi tidak terlaksana dengan baik karena jumlah pangkalan gas LPG yang sedikit dan sistem distribusi gas LPG 3 kg yang belum siap dilaksanakan. Adanya pengawasan yang dilakukan berjalan dengan baik yakni dengan melakukan pengawasan langsung ke pangkalan sehingga kualitas produk gas LPG tetap terjamin.

Kata Kunci : Implementasi, Pendistribusian, Diversifikasi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul : “ **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO.26 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG DALAM RANGKA Mendukung Program Diversifikasi Energi di Kecamatan Medan Timur**”. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Teristimewa dan yang paling utama, kepada ayahanda penulis Azis Salim Rambe dan ibunda tercinta Nambin Nasution A.Ma.Pd yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir penulisan.

2. Bapak Dr. Agusani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
5. Bapak Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
6. Dosen-dosen dan seluruh staff pengajar dan seluruh pegawai dan biro di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Para narasumber yang disertakan dalam penulisan ini yang banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Saudari Efriani Sahriana S.Pd, Asni Dermaito Rambe S.Pd dan Justika Letari Rambe yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Terimakasih ibu Rini Agustina yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan motivasi yang tak terhingga kepada penulis. Bapak Sigit Sudjanarko, Nenek Koestini dan Saudari Ruri Dwi Aprillia yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

10. Buddy Eko Cahyono yang telah memberikan motivasi, pengalaman dan pengetahuan serta cerita yang luar biasa dalam hidup penulis. Ricky Dio Pratama adek kos yang paling ganteng di kos yang telah memberikan pengetahuan tentang gaya hidup kepada penulis. Rizki Dewa Dermawan yang telah membantu penulis dalam bentuk dukungan motivasi yang luar biasa. Wira, manusia yang sulit berpaling hati dari Ami yang telah banyak memberikan penulis bagaimana menghadapi hidup yang fana. Wahyudi Azmi adek kos yang paling imut di kos yang telah banyak menemani hari-hari penulis disaat apapun.
11. Sunly, Azizah simamora, Enda Tiolina Sianipar, Martin Syariandi Siahaan, Ririn Dwi Lestari, Dessy Mei Linda, Rahma Dani sebagai sahabat yang banyak memeberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulisan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Konsep Implementasi	6
1. Pengertian Implementasi	6
2. Pengertian Implementasi Kebijakan	7
3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	8
B. Kebijakan Publik	10
1. Pengertian Kebijakan	10
2. Pengertian Kebijakan Publik	10
3. Analisis Kebijakan Publik	11
4. Ciri-ciri Umum Kebijakan	13
5. Jenis Kebijakan Secara Umum	13
6. Proses Pembuatan Kebijakan	13
7. Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan	15

8. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik	16
C. Distribusi dan Pengadaan	17
1. Definisi Distribusi	17
2. Bentuk-bentuk Saluran Distribusi	18
3. Fungsi-fungsi Saluran Distribusi	19
4. Konflik Dalam Saluran Distribusi	19
5. Definisi Pengadaan	20
6. Fungsi dan Peranan Manajemen Pengadaan	21
7. Prinsip Pengadaan	22
8. Kebijakan Pengadaan	23
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Kerangka Konsep	26
C. Definisi Konsep	26
D. Kategorisasi	28
E. Narasumber	28
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik Analisis Data	30
H. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	31
1. Sejarah Kecamatan Medan Timur	31
2. Letak Geografis Kecamatan Medan Timur	32
3. Demografi Kecamatan Medan Timur	33
4. Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Timur	34
5. Potensi Daerah Kecamatan Medan Timur	37

6. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Medan	38
7. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Medan	40
8. Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Medan	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyajian Data	42
B. Deskripsi Hasil Wawancara	45
C. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	26
Gambar 3.2 Kerangka Konsep	40

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Wilayah Kecamatan Medan Timur	32
Tabel 3.2 Data Jumlah Penduduk	33
Tabel 3.3 Jenis dan Jumlah Sarana Pendidikan	34
Tabel 3.4 Jenis dan Jumlah Sarana Ibadah	35
Tabel 3.5 Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan	36
Tabel 3.6 Potensi Daerah Kecamatan Medan Timur	37
Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin	43
Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Menurut Umur	43
Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan	44
Tabel 4.4 Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: Daftar Jawaban Wawancara
Lampiran IV	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Skripsi
Lampiran V	: SK-2 Penetapan Jusul Skripsi
Lampiran VI	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VIII	: Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran IX	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Surat Keterangan Penelitian Oleh Dinas Perdagangan Kota Medan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsumsi energi fosil di Indonesia yang terus meningkat sebagai dampak langsung dari pertumbuhan ekonomi dan tuntutan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan membaik, serta kondisi sebagian masyarakat Indonesia yang masih boros dalam menggunakan energi, mendorong Pemerintah dalam kebijakannya untuk memprioritaskan upaya konservasi, diversifikasi energi, dan hemat energi. Bertolak dari kenyataan tersebut, pemerintah mendorong peran aktif masyarakat Indonesia untuk menyadari akan pentingnya membangun ketahanan energi melalui konservasi dan diversifikasi energi dalam pengelolaan energi. Pertamina sebagai pelaksana program diversifikasi energi mengeluarkan produknya yaitu Elpiji kemasan 3 kilogram (LPG Tertentu) sebagai solusi Pertamina dalam melaksanakan program diversifikasi energi yang dicanangkan pemerintah; mengkonversi penggunaan minyak tanah menjadi LPG (elpiji). Kemudian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna *liquefied petroleum gas* dan guna mendukung program diversifikasi energi, serta mendorong pembangunan infrastruktur *liquefied petroleum gas* dan peningkatan peran badan usaha, perlu pengaturan penyediaan dan pendistribusian *liquefied petroleum gas* secara terpadu, transparan, akuntabel, kompetitif dan adil.

Pengadaan adalah perolehan barang atau jasa. Hal ini menguntungkan bahwa barang atau jasa yang tepat dan bahwa mereka yang dibeli dengan biaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam hal kualitas dan kuantitas,

waktu dan lokasi (Weele : 2010). Distribusi merupakan suatu proses kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen Tjiptono (2008). Jadi apabila pengadaan dan pendistribusian tidak terimplementasi dengan baik maka pemenuhan terhadap pemasaran dan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat akan terkendala sehingga dapat menimbulkan kelangkaan, kenaikan harga barang yang tidak terkendali dan tidak tepatnya sasaran pemasaran.

Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG yang berisikan beberapa peraturan . (1) Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan pendataan rumah tangga dan usaha mikro Pengguna LPG Tertentu yang memenuhi kriteria : a. memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu Penduduk Musiman dan kartu keluarga (KK) pada wilayah yang di data; b. mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan dibuktikan melalui slip gaji atau pengeluaran tidak lebih dari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat. (2) Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melaksanakan distribusi LPG Tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang ditentukan. (3) Penyalur LPG Tertentu dalam menyalurkan LPG Tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro dapat menunjuk sub Penyalur LPG Tertentu dan dilaporkan kepada Badan Usaha

pemegang Izin Usaha Niaga LPG dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (4) Penyalur LPG Tertentu menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran yang harus ditandatangani dan disimpan oleh Penyalur LPG Tertentu dan sub Penyalur LPG Tertentu. (5) Penyalur LPG Tertentu mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu kepada sub Penyalur LPG Tertentu pada Buku Catatan (Logbook) Penyalur LPG Tertentu. (6) Sub Penyalur LPG Tertentu mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu pada Buku Catatan (Logbook) sub Penyalur LPG Tertentu. (7) Setiap Penyalur LPG Tertentu memiliki catatan mengenai lokasi setiap sub Penyalur LPG Tertentu dan alokasi LPG Tertentu yang didistribusikan pada Buku Catatan (Logbook) Penyalur LPG Tertentu. (8) Setiap Buku Catatan (Logbook) LPG Tertentu dan Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran dari Penyalur LPG Tertentu ke sub Penyalur LPG Tertentu merupakan dokumen penyaluran yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setiap satu bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Namun faktanya, sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu tidak terlaksana sehingga LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tidak tepat sasaran karena LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah diperuntukkan hanya untuk pengguna yang tidak mampu/miskin. Dan karena tidak terlaksananya secara utuh sistem tersebut dapat juga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kg di masyarakat. Meskipun demikian masyarakat masih mengalami kelangkaan saat membeli gas yang disubsidi oleh pemerintah tersebut. Salah satu sebabnya adalah tidak adanya informasi distribusi LPG 3 kg. Ketersediaan informasi distribusi

LPG 3 kg dapat membantu masyarakat untuk mengetahui kapan dan dimana gas bisa didapatkan.

Dengan adanya permasalahan yang dihadapi saat ini, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

“Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Lpg Dalam Rangka Mendukung Program Diversifikasi Energi Di Kecamatan Medan Timur”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah peneliti ini adalah “ Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG Dalam Rangka Mendukung Program Diversifikasi Energi Di Kecamatan Medan Timur?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG Dalam Rangka Mendukung Program Diversifikasi Energi Di Kecamatan Medan Timur.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan bagi instansi yang bersangkutan antara lain :

- a. Penulis dapat menilai suatu kebijakan yang sudah sesuai diimplementasikan atau akan diimplementasikan apakah sudah sesuai dengan tujuan atau belum.
- b. Peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara.
- c. Sebagai bahan masukan atau saran kepada agar dapat mengoptimalkan perannya sebagai penyedia dan pendistribusi LPG.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A.Konsep Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Tahapan penting dari suatu kebijakan publik adalah implementasi. Implementasi selalu dianggap merupakan pelaksanaan dari apa saja yang telah diputuskan oleh suatu instansi pemerintah (pengambilan keputusan). Dengan begitu implementasi merupakan tahapan suatu kebijakan yang diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan kebijakan itu dibuat.

Menurut Meter (2005:135) perumusan implementasi sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan baik individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar terapai tujuan –tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Mazmanian (2005:149) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan.

Menurut Tangkilisan (2003 : 29) menyatakan bahwa Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Winarno (2005 : 101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pengetahuan implementasi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang sesuai dengan kebijakan.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (1991 : 45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Edward (2002 : 125) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Winarno (2005 : 101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dikemukakan implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan ini dilaksanakan untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan sebelumnya dari sini juga dapat dilihat apakah suatu kebijakan ini akan berhasil atau tidak dalam penerapannya.

Menurut Dwijowijoto (2003 : 158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Tachjan (2006 : 26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi: (1) adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang

ingin dicapai; (2) adanya target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan; (3) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Menurut Meter (2008 : 146) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup bermasyarakat agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson (2005:5) mengatakan bahwa kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang actor atau sejumlah ator berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Jones (2007:12) kebijakan ialah berdirinya keputusan ditandai dengan konsistensi perilaku dan berulang yang membuatnya dan orang-orang baik di pihak mereka yang mematuhi.

Kemudian Knoepfel (2007:10) menjelaskan kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik / pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespon, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah langkah atau tindakan yang dilakukan oleh publik/pemerintah maupu swasta yang disepakati bersama dalam memecahkan suatu masalah.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Wayne (1976:6) mengidentifikasi kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang di cirikan dengan konsistensi dan pengulangan atau repetisi

tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Menurut Hartono (2007:8) yang merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik adalah antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya.

Menurut Zainal (2006:154) yang merumuskan kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang di ambil (atau gagal diambil) untuk di implementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang di berikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Kemudian Jenkins (1978:15) mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang di ambil oleh seorang aktor politik MUU atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi.

Dari beberapa definisi di atas dapat di simpulkan bahwa kebijakan publik adalah langkah atau tindakan yang dilakukan oleh publik/pemerintah maupun swasta yang disepakati bersama dalam memecahkan suatu masalah.

3. Analisis Kebijakan Publik

Perbedaan analisis kebijakan dengan perumusan, implementasi dengan evaluasi kebijakan adalah analisa kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam perumusan kebijakan karena ia memberikan pijakan awal mengapa sebuah kebijakan harus dibuat.

Perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditentukan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Weimer (2005) menyatakan bahwa analisis kebijakan publik adalah proses mengevaluasi beberapa alternatif kebijakan, dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar diperoleh alternatif terbaik untuk dijadikan tindakan kebijakan.

Dunn (1993) menyatakan bahwa analisis kebijakan publik adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan multi-metode penelitian dan argument untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang *policy relevant* buat memecahkan masalah kebijakan.

Williams (1971) menyatakan bahwa analisis kebijakan publik adalah cara untuk mensintensakan informasi, termasuk hasil penelitian, untuk menghasilkan format keputusan kebijakan (penentuan pilihan-pilihan alternatif) dan untuk menentukan kebutuhan masa depan akan informasi yang *policy relevant*.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa analisis kebijakan publik adalah penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga mencari dan mengkaji berbagai alternatif memecahan masalah atau pencapaian tujuan yang mana kegiatan ini memiliki sifat multidisiplin.

4. Ciri-Ciri Umum Kebijakan

Anderson dan kawan-kawan (1984:2-3) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan sebagai berikut : (1) setiap kebijakan harus ada tujuan. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena ada kebetulan ada kesempatan membuatnya. tanpa tujuan tidak perlu ada kebijakan. (2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum. (3) kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah. (4) kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berbentuk pengarah untuk melaksanakan atau menganjurkan.

5. Jenis Kebijakan Secara Umum

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2006 : 31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: (1) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; (2) kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum; (3) kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

6. Proses Pembuatan Kebijakan

Menurut Dun (2003:26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yakni : (1) perumusan Masalah, Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan

asumsi-asumsi yang mendasari defenisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebab-penyebab, meletakkan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluang kebijakan baru. (2) peramalan, Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa yang mendatang sebagai akibat diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahap ini disebut juga dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan plausible, potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat kebijakan yang ada atau diusulkan mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam penyampaian tujuan dan mengestimasi kelayakan publik dari berbagai pilihan. (3) rekomendasi, Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari alternatif yang akibatnya dimasa yang akan datang telah diestimasi melalui peramalan, ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkata resiko dan ketidakpastian mengenali eksternalitas dan akibat ganda. (4) pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan bahwa relevan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. (5) evaluasi, membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang

benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

7. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik tergantung sejauh mana para aktor kebijakan memahami dan menerapkan analisis mereka. Karena pada dasarnya tidak ada satupun kebijakan yang dapat dikatakan berhasil seratus persen. Akan tetapi akan ada beberapa faktor yang perlu dibahas terkait hambatan implementasi kebijakan publik dan peluang-peluang keberhasilannya, diantaranya adalah : (1) isi Kebijakan, Kegagalan implementasi disebabkan samanya dari isi kebijakan yaitu : a. tujuan yang tidak cukup terperinci ; b. sarana-sarana dan penetapan prioritas yang tidak jelas (tidak ada); c. program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada. (2) kurang Informasi, kurang informasi mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat, baik mengenai pelaksanaan, isi kebijakan yang akan dilaksanakan, hasil-hasil kebijakn. Struktur komunikasi antar organisasi pelaksana dan objek kebijakan. Objek kebijakan (kelompok sasaran) tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi. (3) dukungan, dukungan yang kurang sebelum atau sesudah adanya implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa persoalan, ketidak setujuan, atau indikasi perlawanan dari beberapa pihak, atau masyarakat sebagai objek kebijakan yang umum lebih lanjut. Berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan publik diantaranya adalah a.

hambatan politik, ekonomi dan lingkungan; b.kelemahan institusi; c. ketidakmampuan institusi SDM dalam bidang teknis administratif d. kekurangan dalam bantuan teknis; e. pengaturan waktu; f. sistem informasi yang mendukung; g. perbedaan agenda tujuan dan faktor

8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Menurut Wahab (1991 : 148) mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan: (1) komunikasi (*comunication*), pelaksanaan kebijakan untuk memahami fungsi dan tugasnya, implementasi dituntut dapat secara konsisten dan konsekuen berbuat dan berindak sesuai apa yang menjadi tujuan yang ada; (2) sumber daya (*resouces*), implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagai mana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya, baik itu yang menyangkut sumber daya manusia, dana dan fasilitas lainnya; (3) sikap implementator (*dispositions*), implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila implementatornya bersikap baik dan bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya; 4) struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), meskipun sumber daya sudah tersedia, implementator sudah tahu apa yang telah dilakukan atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksana juga msih dihadapkan pada struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut.

C. Distribusi dan Pengadaan

1. Defenisi Distribusi

Menurut Keller (2010:49), saluran distribusi adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung yang tercakup dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi.

Menurut Alma (2007:49), saluran distribusi merupakan lembaga yang saling terkait untuk menjadi produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi.

Menurut Tjiptono (2008:285), saluran distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat dibutuhkan).

Menurut Daniel (2003:8), saluran distribusi adalah serangkaian dari organisasi yang saling bergantung yang memudahkan pemindahan kepemilikan sebagaimana produk-produk bergerak dari produsen ke pengguna atau pelanggan.

Sedangkan menurut Kotler (2010:106) saluran pemasaran adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran pemasaran merupakan seprangkat alur yang diikuti produk atau jasa setelah produksi, berakhir dalam pembelian dan digunakan oleh pengguna akhir.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga

penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).

2. Bentuk-bentuk Saluran Distribusi

Menurut Indriyo (1999) di dalam saluran distribusi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu (1) saluran distribusi langsung, pada saluran distribusi ini pengusaha berusaha untuk menyalurkan barang-barang yang dibeli konsumen secara langsung ketempat konsumen tinggal. Dengan demikian diharapkan konsumen akan merasa puas karena konsumen tidak perlu lagi memikirkan masalah pengangkutan barang yang dibelinya itu kerumah mereka dan (2) saluran distribusi tidak langsung, pengusaha menggunakan pihak luar untuk membantu menyalurkan barang-barangnya kepada konsumen. Pihak luar tersebut merupakan penyalur atau pedagang perantara. Ara penyaluran secara tidak langsung ini pada umumnya dilakukan pengusaha lain yang bergerak dalam perdagangan atau penyaluran suatu barang. Perusahaan (penyalur) tersebut biasanya bukan milik produsen karena jika penyaluran tersebut dilakukan dan dimiliki sendiri maka tentu saja akan memakan biaya yang sangat mahal. Pada umumnya pengusaha menggunakan cara penyaluran semacam ini terutama bagi barang-barang konvenien atau kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena barang konsumen menyangkut lokasi pasar yang sangat luas dan menyebar keseluruhan penjurus daerah pasar.

3. Fungsi-fungsi Saluran Distribusi

Pada pokok-pokoknya fungsi-fungsi pemasaran yang dilaksanakan dalam saluran distribusi dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu fungsi pertukaran(1) fungsi pertukaran, pada fungsi pertukaran dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembelian, penjualan, dan pengambilan resiko. (2) fungsi penyediaan Fisik, ada empat macam fungsi penyediaan fisik, yaitu pengumpulan, penyimpanan, pemilihan, pengangkutan. (3) fungsi penunjang, fungsi ini bersifat membantu untuk menunjang terlaksananya fungsi yang lain, termasuk dalam fungsi ini , yaitu pelayanan sesudah pembelian, pembelanjaan, penyebaran informasi, dan koordinasi saluran.

4.Konflik Dalam Saluran Distribusi

Menurut Indriyo (1994) jenis konflik dalam saluran distribusi ada dua yaitu (1) konflik horizontal, konflik ini menunjukkan konflik yang terjadi antara perantara pada tingkat distribusi yang sama. Penyebab konflik horizontal adalah akibat scrambledmerchandising maksudnya kebiasaan pedagang perantara menganekaragamkan persediaan produk-produk mereka dengan menambah jenis produk-produk mereka dengan menambahkan jenis produk baru yang non-tradisional. Konflik juga dapat terjadi antara produsen dan perantara. Perantara selalu berusaha menambah jenis barang baru untuk menarik pelanggan lebih banyak dan menambah lama, sedangkan produsen selalu berusaha menambah para penyalur atau perantara untuk memperluas pasar sasaran.(2) konflik vertikal, konflik ini dapat terjadi antara : a. produsen dengan pedagang besar, timbulnya

ketegangan antara produsen dan pedagang besar disebabkan oleh beberapa aspek dalam hubungan bisnis yaitu terletak pada titik pandangan masing-masing pihak. Baik produsen maupun pedagang besar keduanya memproyeksikan persaingan agresif produk tersebut atau keduanya memberikan pelayanan yang berbeda. Disatu pihak, pedagang besar mengeluarkan biaya begitu banyak dan peraya kepada produsen untuk tidak menyalurkan sendiri ke konsumen.(b) produsen dengan pengecer, tetapi produsen terpaksa juga menyalurkan langsung ke konsumen atau pengecer keil lainnya karena produsen tidak puas atau pelayanan yang diberikan pedagang besar dan kondisi pasar menyebabkan produsen menyalurkan langsung. Menghadapi pedagang besar ini, produsen dihadapkan dua pilihan, yaitu menjual langsung kepada konsumen atau menjual langsung kepada pengecer.

5. Defenisi Pengadaan

Weele (2010) Pengadaan adalah perolehan barang atau jasa. Hal ini menguntungkan bahwa barang atau jasa yang tepat dan bahwa mereka yang dibeli dengan biaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi.

Siahaya (2013) Pengadaan merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang strategis dalam penyelenggaraan perusahaan, institusi dan Negara dimana rata-rata 70 persen dari keseluruhan anggaran dialokasikan pada sector pengadaan barang dan jasa.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, Dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa atau *procurement* adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman dan harga yang terjangkau.

6. Fungsi dan Peranan Manajemen Pengadaan

(1) fungsi, manajemen pengadaan mempunyai berbagai macam fungsi yang dapat dikelompokkan menjadi: (a) pembelian (*purhasing*), merupakan kegiatan lebih difokuskan kepada pembelian barang (*material*) dan peralatan (*equipment*) (b) penyewaan (*Leasing*), merupakan kegiatan sewa-menyewa baik sewa murni atau dengan sewa dengan opsi untuk membeli (c) konstruksi (*constrution*), merupakan kegiatan membangun wujud fisik (d) konsultasi (*consultation*), merupakan kegiatan jasa keahlian profesional (e) inspeksi (*inspection*), merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian (f) swakelola (*self management*), merupakan kegiatan yang dilaksanakan sendiri (internal) (g) tukar tambah (*trade-in*), merupakan kegiatan tukar-menukar barang dengan membayar selisih harga, untuk memperbolehkan barang yang sesuai dengan kebutuhan operasi, untuk menghindari kerugian perusahaan (h) beli kembali (*factory buy-back*), merupakan kegiatan pembelian kembali oleh pabrik pembuatan terhadap barang

yang tidak terpakai untuk mengurangi kerugian perusahaan (i) Barter (*Exchange*), merupakan kegiatan tukar-menukar barang secara langsung (tukar guling).

(2) Peranan, manajemen pengadaan berperan sebagai proses penentuan secara sistematis, apa (spesifikasi, kualitas), kapan (jadwal, *delivery time*), bagaimana (sumber, sistem) dan berapa (kuantitas) untuk mengadakan barang dan jasa dari sumber pengadaan sampai ketempat tujuan sesuai kualitas dan kuantitas, biaya yang optimal dan waktu suplai yang wajar untuk memenuhi kebutuhan.

7. Prinsip Pengadaan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sejak perencanaan harus menerapkan prinsip pengadaan : (a) efektif, sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perusahaan (b) efisien, diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kontribusi yang sebenar-benarnya (c) kompetitif, dilakukan melalui dengan seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa dan setara memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan (d) transparan, semua ketentuan dan informasi, baik teknik maupun administratif termasuk tatacara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan pemenang harus bersifat terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang berminat (e) adil, tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu (f)

bertanggung jawab, mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai suplai (g) berpihak kepada produk dalam negeri, mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional dan internasional (h) berwawasan lingkungan, mendukung dan mengembangkan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan .

8. Kebijakan Pengadaan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan selalu harus menerapkan kebijakan pengadaan : (a) melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan sesuai peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien (b) melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip QCD (*Quality, Cost, Delivery*). (c) melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis Procurement One (satu regulasi, satu interpretasi dan satu implementasi). d) melaksanakan pengadaan barang dan jasa langsung ke produsen, dengan mengutamakan produsen dalam negeri atau melalui distributor yang ditunjuk oleh produsen dalam negeri. (e) melaksanakan pengadaan sendiri barang dan jasa secara swakelola atau melalui pemasokan (penyediaan barang dan jasa). (f) melaksanakan pengadaan barang dan jasa di dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. (g) mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan potensi nasional. (h) menjamin kepastian peraturan dan kepastian usaha serta memberi kesempatan berusaha bagi produsen dan perusahaan dalam negeri

terutama usaha kecil. (i) menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib dan terkendali, dengan ara meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. (j) mempercepat proses pelaksanaan dan memperpendek waktu proses dan birokrasi pengadaan barang dan jasa . (k) melaksanakan kegiatan pengadaan sesuai dengan ketentuan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan. (l) meningkatkan kinerja dan tanggung jawab para perencana, pelaksana, serta pengawas pengadaan barang dan jasa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan dan narasumber.

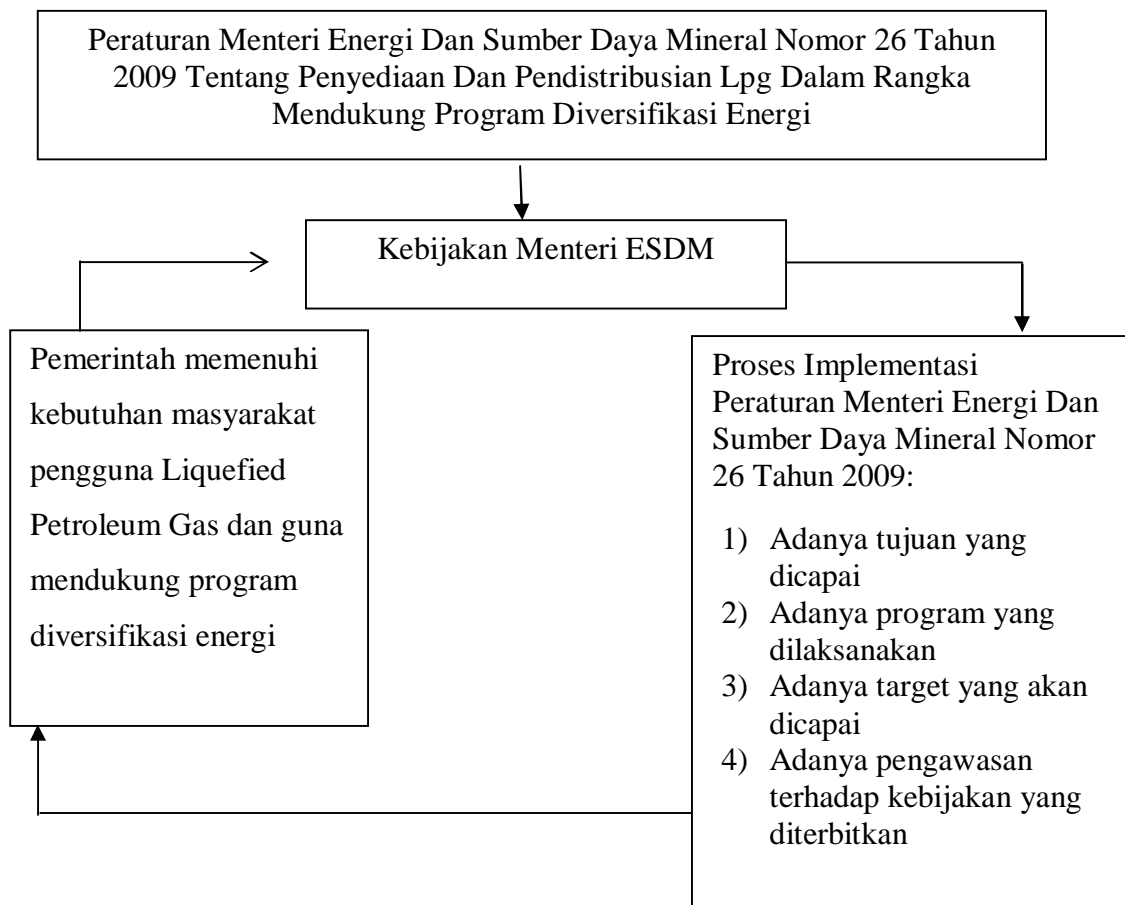
Menurut Subyantoro (2006 : 75) penelitian deskriptif bertujuan melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala dan sebagainya yang merupakan obyek penelitian. Dengan lain perkataan, penelitian ini ditujukan untuk memecahkan masalah. Pelaksanaanya tidak terbatas kepada pengumpulan data saja melainkan juga meliputi analisis dan interpretasi dari data itu. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menuturkan, menganalisis, mengklarifikasi, memperbandingkan dan sebagainya sehigga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan- kesimpulan yang bersifat deduktif.

Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

B. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



C. Definisi konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

1. implementasi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang

terencana sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang sesuai dengan kebijakan.

2. implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup bermasyarakat agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.
4. Kebijakan adalah langkah atau tindakan yang dilakukan oleh publik/pemerintah maupu swasta yang disepakati bersama dalam memecahkan suatu masalah.
5. Kebijakan publik merupakan kebijakan publik adalah langkah atau tindakan yang dilakukan oleh publik/pemerintah maupun swasta yang disepakati bersama dalam memecahkan suatu masalah.
6. Analisis kebijakan publik adalah penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga mencari dan mengkaji berbagai alternatif memecahan masalah atau pencapaian tujuan yang mana kegiatan ini memiliki sifat multidisiplin.
7. Distribusi adalah sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen,

sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).

8. pengadaan barang dan jasa atau *procurement* adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman dan harga yang terjangkau.

D. Kategorisasi

Kategorisasi Kategorisasi adalah penyusunan kategori , dengan kata lain kategori merupakan salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan dan bagian pengalaman yang disusun berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat, kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya tujuan yang dicapai
2. Adanya program yang akan dilaksanakan
3. Adanya target yang akan dicapai
4. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

E. Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber, untuk memberikan pandangan terhadap Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG Dalam Rangka Mendukung Program Diversifikasi Energi Di Kecamatan Medan Timur yang dihadapkan informasinya dapat dijadikan data.

1. Nama : Rislana Indra
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
2. Nama : Sunata
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Seksi Penggunaan Dan Pemasaran Dalam Negeri
3. Nama : Wahyu Apriliyanto
Pekerjaan : Pegawai
Jabatan : Junior Officer Operation Planning & Transportation
4. Nama : Juliadi
Pekerjaan : Pedagang Gas LPG
5. Nama : Rini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Nama : Tuti
Pekerjaan : Pedagang (Warung Makan)
7. Nama : Yuniati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan cara wawancara. Menurut Ali (1997:152), wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara bertanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui referensi buku-buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan situs Internet yang dapat dipercaya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis.

Data yang berasal dari wawancara, selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif untuk diinterpretasikan pada masing-masing jawaban yang diberikan oleh responden penelitian. Gambaran deskriptif dari karakteristik dan pilihan jawaban responden penelitian juga diukur dengan menentukan presentase dari masing-masing karakteristik dan jawaban serta data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral

Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG Dalam Rangka Mendukung Program Diversifikasi Energi Di Kecamatan Medan Timur.

H. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di beberapa lokasi, yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Medan, Jalan A.H. Nasution Medan ; Kecamatan Medan Timur dan Pertamina Region 1, Jalan KL. Yos Sudarso, Medan.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Medan Timur

Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu Kecamatan Induk Kota Medan, yang terbentuk pada saat dibentuknya Kota Medan sesuai dengan UU Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1992 sesuai dengan PP Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tk. II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, dan Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Medan dalam Wilayah Provinsi Daerah Tk. I Sumatera Utara, Kecamatan Medan Timur dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu Kecamatan Medan Timur dengan 11 Kelurahan dan Kecamatan Medan Perjuangan dengan 9 Kelurahan.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Medan Timur terletak di jalan H.M Said No. 1 Kelurahan Gaharu berada di areal tanah seluas 1400 m² yang memiliki fasilitas 1 (satu) unit gedung kantor, 1 (satu) unit rumah dinas dan 1 (satu) unit aula dengan luas 100 m².

Pada awal pembentukan Kota Medan, hanya terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dimana Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu kecamatan yang pada saat dibentuknya Kota Medan sesuai dengan Undang-Undang.

2. Letak Geografis Kecamatan Medan Timur

Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu kawasan inti perkotaan yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bebatasan dengan Kecamatan Medan Deli
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Medan Kota
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Medan Tembung,
Kecamatan Medan Perjuangan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Medan Barat

Adapun luas Kecamatan Medan Timur adalah 7,82 km² Kelurahan Pulo Brayon Bengkel Baru memiliki wilayah terluas yaitu 1,17 km² dan Kelurahan Gang Buntu 0,40 km² selanjutnya rincian luas masing-masing kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Wilayah Kecamatan Medan Timur

No	Kelurahan	Luas KM	Jumlah Lingkungan
1	Gang Buntu	0,40	11
2	Sidodadi	0,46	11
3	Durian	0,54	12
4	Gaharu	0,52	12
5	Glugur Darat I	0,79	13

6	Glugur Darat II	0,76	12
7	Pulo Brayan Darat I	0,75	14
8	Pulo Brayan Darat II	0,88	15
9	Pulo Brayan Bengkel	1,06	11
10	Pulo Brayan Bengkel Baru	1,17	12
11	Perintis	0,49	5
	JUMLAH	7,82	128

Sumber Data Profil Kecamatan Medan Timur Tahun 2017

3. Demografi Kecamatan Medan Timur

Berdasarkan Data Mutasi Mutandis tahun 2016 Jumlah penduduk Kecamatan Medan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Data Jumlah Penduduk

NO	KELURAHAN	JUMLAH KK			JUMLAH PENDUDUK		
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	Gang Buntu	1.204	1.195	1.190	5.544	5.427	5.346
2	Sidodadi	1.796	1.195	1.795	8.117	8.108	9.114
3	Durian	2.416	2.416	2.368	11.452	11.091	11.216
4	Gaharu	3.223	3.223	3.223	12.756	12.713	12.593
5	Glugur Darat I	3.092	3.094	3.177	11.929	11.863	11.842
6	Glugur Darat II	3.275	3.293	3.368	13.875	13.763	13.813
7	Pulo Brayan Darat I	4.468	4.614	4.766	20.265	20.253	20.204
8	Pulo Brayan Darat II	3.849	3.481	3.393	17.013	16.943	16.972
9	Pulo Brayan	3.750	3.750	3.175	18.879	18.888	18.888

	Bengkel						
10	Pulo Brayan Bengkel Baru	2.914	2.914	2.914	12.720	12.714	12.733
11	Perintis	1.295	1.295	1.295	5.718	5.697	5.669
	JUMLAH	31.285	30.470	30.664	138.268	137.460	138.390

Sumber : Data Mutasi Mutandis Kecamatan Medan Timur Tahun 2017

4. Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Timur

Letaknya yang berada di inti kota membuat sarana dan prasarana di Kecamatan Medan Timur cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan beberapa sarana pendidikan, kesehatan dan tempat ibadah yang mudah dijumpai.

Beberapa perguruan tinggi yang cukup ternama di Kota Medan yang berada di Wilayah Kecamatan Medan Timur yaitu Universitas HKBP Nommensen dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Instansi Pemerintah yang berada di Kecamatan Medan Timur diantaranya Polsek Medan Timur, Kejaksaan Negeri, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kominfo Kota Medan dan lain-lain.

Adapun jumlah sarana dan prasarana pendukung di Kecamatan Medan Timur selanjutnya akan diuraikan secara lebih terperinci pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Jenis Dan Jumlah Sarana Pendidikan

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta
1	PAUD/TK	3	33
2	SD	21	18
3	SMP	2	18

4	SMA	3	14
5	PERGURUAN TINGGI	-	5
6	SEKOLAH KHUSUS	-	1
	Jumlah	29	1

Sumber Data Profil Kecamatan Medan Timur Tahun 2017

Sarana pendidikan yang tersedia di Kecamatan Medan Timur sangat lengkap mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup diminati oleh masyarakat juga terdapat di Kecamatan Medan Timur lebih tepatnya berada di Kelurahan Glugur Darat II yaitu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan di Kelurahan Perintis yaitu Universitas HKBP Nommensen.

Dalam meningkatkan ketaqwan masyarakat Kepada Tuhan Yang Maha Esa di Kecamatan Medan Timur juga terdapat sarana dan prasarana ibadah yang secara terperinci digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Jenis Dan Jumlah Sarana Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	MESJID	52
2	MUSHOLLAH	33
3	GEREJA	24
4	VIHARA	10
5	PURA	2
	Jumlah	121

Sumber Data Profil Kecamatan Medan Timur Tahun 2017

Dari data di atas dapatlah dilihat bahwa penduduk Kecamatan Medan Timur merupakan penduduk yang heterogen namun kerukunan hidup antar umat

beragama dan sikap saling hormat menghormati antar pemeluk agama sangat terjaga dan tidak pernah terjadi perselisihan antar umat beragama.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, maka di Kecamatan Medan Timur terdapat sarana dan prasarana kesehatan yang baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun pihak swasta secara terperinci sarana dan prasarana kesehatan dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Jenis Dan Jumlah Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	RUMAH SAKIT	7
2	KLINIK	20
3	PUSKESMAS/PUSTU	1
4	POSYANDU BALITA	78
5	POSYANDU LANSIA	10
6	APOTEK	32
7	LABORATORIUM	4
8	PRAKTEK DOKTER UMUM	76
9	PRAKTEK DOKTER GIGI	32
	Jumlah	260

Sumber Data Profil Kecamatan Medan Timur Tahun 2017

Pada tabel di atas Kecamatan Medan Timur mempunyai sarana kesehatan yang beragam seperti Rumah Sakit pemerintah yaitu Rumah Sakit Pirngadi yang berada di kelurahan Perintis, Rumah Sakit Swasta Murni Teguh yang berada di kelurahan Gang Buntu, selain dari itu Kecamatan Medan Timur juga mempunyai Rumah Sakit Jiwa yang berada di Kelurahan Gaharu.

5. Potensi Daerah Kecamatan Medan Timur

Sebagai kecamatan yang terletak di inti Kota Medan dan termasuk wilayah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan beberapa potensi yang ada di Kecamatan Medan Timur yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Potensi Daerah Kecamatan Medan Timur

No	Uraian	Jumlah	
		Tahun 2016	Tahun 2017
1	PERKANTORAN	27	27
2	BANK	15	15
3	PASAR TRADISIONAL	5	5
4	PASAR MODREN	1	1
5	HOTEL	1	-
6	PERTOKOAN	550	555
7	WARNET	57	59
8	BENGKEL		
	- BENGKEL MOBIL	12	15
	- BENGKEL MOTOR	27	27
9	DOOR SMEER		
	- DOOR SMEER MOBIL	15	15
	- DOOR SMEER MOTOR	23	25
10	RESTORAN/RUMAH MAKAN/WARUNG		
	- RESTORAN	7	7
	- WARUNG MAKAN/MINUM	232	235
11	TUKANG PANGKAS	51	53
12	SALON	20	20

13	PLAY STATION	5	5
14	PENYEWA KASET	5	5
15	PABRIK	17	17
16	PERGUDANGAN	27	27

Sumber Data Profil Kecamatan Medan Timur Tahun 2017

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat berbagai jenis usaha ekonomi baik yang berskala besar, sedang dan kecil, yang terdapat di Kecamatan Medan Timur. Semua potensi ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat baik itu dari segi tenaga kerja maupun pengurus dana CSR untuk memajukan kecamatan. Pertumbuhan perekonomian dilihat dari data di atas cukup pesat yaitu perbandingan tahun 2015 dan 2016 dimana data jumlah pertokoan, bengkel, tukang pangkas dan pergudangan jumlahnya meningkat di tahun 2016.

6. Visi Dan Misi Dinas Perdagangan Kota Medan

a. Visi

Adapun Visi yang disepakati dan ditetapkan untuk Dinas Perdagangan Kota Medan tidak lepas dari ruang lingkup Visi Kota Medan guna mendukung pembangunan sektor perdagangan Kota Medan. Visi Dinas Perdagangan Kota Medan adalah “Terwujudnya Perdagangan Yang Tangguh Guna Mendukung Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Kota Medan”

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Perdagangan Kota Medan, sekaligus mempertegas tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing bidang

dan bagian, sebagai unsur pelaksana program-program dan kegiatan maka Misi Dinas Perdagangan Kota Medan adalah

- a) Mewujudkan peningkatan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat
- b) Peningkatan sistem informasi dan komunikasi, kerjasama dan kemitraan perdagangan.
- c) Mewujudkan perdagangan yang efisien dan efektif menghadapi pasar bebas.
- d) Mewujudkan perluasan akses dan jaringan produk melalui penguatan pasar lokal dan antaer daerah.
- e) Mewujudkan pelaku usaha jujur dan konsumen cerdas.

8. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Medan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No.15 Tahun 2016, Dinas Perdagangan Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perdagangan berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perdagangan Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perdagangan.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota Medan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber ada 2 orang dari pihak Dinas Perdagangan, 1 orang dari pihak Pertamina 1, orang dari pihak pedagang dan 3 orang dari pihak masyarakat pengguna LPG 3 kg.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.

1. Deskripsi Narasumber

a. Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori.

Tabel 4.1

Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	LAKI-LAKI	3	42,9 %
2	PEREMPUAN	4	57,14%
	Jumlah	7	100 %

Sumber Data Angket 2018

b. Deskripsi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut Umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu Narasumber dengan umur 20-35 tahun, 36--45 tahun, dan narasumber dengan umur 46-55 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori umur sebagai berikut.

Tabel 4.2

Deskripsi Narasumber Menurut Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	20-35	2	28,57 %
2	36-45	1	14,28 %
3	46-55	4	57,14 %
	Jumlah	7	100%

Sumber Data Data Angket 2018

c. Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu S2, S1 dan SMA pada tabel 4.3 di bawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.3

Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S2	1	14,28 %
2	S1	3	42,85 %
3	SMA	3	42,85 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber Data Angket 2018

d. Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda beda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber maka akan di kelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu Aparatur Sipil Negara, Pegawai BUMN dan Wirausaha. Pada tabel 4.4 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.4

Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

No	Tingkat Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Aparatur Sipil Negara	2	33,3 %
2	Ibu Rumah Tangga	2	33.3 %
3	Wirasaha	1	16.7 %
	Jumlah	6	100 %

Sumber Data Angket 2018

Bagaimana karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai pengumpul data penelitian ini. Selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan berikut ini :

B. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut :

1. Adanya Tujuan yang dicapai

Mencapai suatu tujuan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Tujuan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG Dalam

Rangka Mendukung Program Diversifikasi Energi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna LPG.

Menurut Bapak Rislana Indra selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018 mengatakan tujuan dari Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 berjalan dengan baik, namun belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna gas LPG secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan terkadang masih terjadi kelangkaan LPG 3 kg, sehingga masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhannya terhadap gas LPG 3 kg. Namun jika terjadi kelangkaan LPG 3 kg pihak Dinas Perdagangan langsung mengambil tindakan cepat untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan kerja sama dengan pihak Pertamina untuk mengadakan operasi pasar agar tidak terjadi kelangkaan LPG 3 kg bekerja panjang.

Menurut Ibu Sunata selaku Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri menjelaskan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018 mengatakan bahwa tujuan dari Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pendistribusian yang lancar. Namun demikian tetap saja masih ada terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi meski jarang terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Dinas melakukan kerja sama dengan Pertamina untuk mengadakan Operasi Pasar sebagai bentuk respon pemerintah dalam menangani masalah kelangkaan gas LPG. Operasi Pasar tersebut dilakukan dengan cara

mengadakan penjualan di daerah yang terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg dan menjualnya kepada masyarakat dengan sampai keadaan kelangkaan gas LPG 3 kg sudah tidak terjadi lagi.

Menurut Bapak Wahyu Apriliyanto selaku Junior Officer Operation Planning & Transportation dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 maret 2018 mengatakan bahwa tujuan dari Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan kebutuhan masyarakat pengguna LPG dapat terpenuhi meski terkadang terjadi kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg namun hal tersebut jarang terjadi. Untuk menangani masalah kesulitan kelangkaan LPG, Pertamina melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

Menurut Bapak Juliadi selaku Pedagang Gas LPG dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018 mengatakan bahwa tujuan dari Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 berjalan dengan baik. Karena masyarakat tetap dapat dipenuhi permintaannya dalam melakukan pembelian gas LPG, meski terkadang gas habis karna permintaan yang tinggi dan menunggu stok gas yang baru sekitar satu atau dua hari. Hal tersebut dikarenakan harus menunggu stok gas LPG sesuai dengan jadwal yaitu dua kali dalam seminggu.

Kemudian Ibu Rini selaku masyarakat pengguna gas LPG pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018 mengatakan bahwa tujuan dari Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya

Mineral Nomor 26 Tahun 2009 berjalan dengan baik. Karena setiap melakukan pembelian gas LPG 3 kg tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkannya dan tidak pernah mengalami keadaan kelangkaan gas LPG 3 kg.

Lalu Ibu Yuniarti selaku masyarakat pengguna gas LPG pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018 mengatakan bahwa tujuan dari Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 berjalan dengan baik. Karena dalam setiap melakukan pembelian gas LPG 3 kg kedai selalu tersedia dan tidak pernah mengalami kelangkaan LPG, sehingga kebutuhan saya terhadap gas LPG dapat terpenuhi.

Selanjutnya Ibu Tuti selaku pengguna gas LPG pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018 mengatakan bahwa bahwa tujuan dari Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 belum berjalan dengan baik. Karena dalam melakukan pembelian gas LPG sering kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Untuk mendapatkan gas LPG 3 kg harus mencari ke pangkalan gas/kedai yang jauh sehingga membutuhkan dana tambahan untuk biaya transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keseluruhan narasumber mengatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Program merupakan kesatuan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang dapat diimplementasikan, program pendistribusian LPG bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna LPG. Program tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam rangka diversifikasi energi dari minyak tanah ke gas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rislan Indra, selaku kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018 menyatakan program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengguna LPG yang ada. Hampir keseluruhan masyarakat Medan Timur sudah menggunakan gas LPG karena menggunakan LPG yang dirasakan masyarakat lebih efektif dan efisien. Program penggunaan gas LPG sudah berjalan sejak tahun 2009 dan masyarakat sampai sekarang masih tetap menggunakan gas LPG.

Selanjutnya Ibu Sunata selaku seksi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri menjelaskan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018 mengatakan bahwa program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam penggunaan gas LPG sejak tahun 2009 sampai sekarang. Jumlah penggunaan gas tidak mengalami penurunan bahkan mengalami peningkatan pengguna gas. Hal ini membuktikan bahwa program diversifikasi dari penggunaan minyak tanah ke

gas berjalan dengan baik ataupun berhasil dilaksanakan. Dan program ini diharapkan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Kecamatan Medan Timur.

Menurut Bapak Wahyu Apriliyanto selaku Junior Officer Operation Planning & Transportation dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 maret 2018 mengatakan bahwa program yang dilaksanakan dari Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 berjalan dengan baik. Karena masyarakat begitu antusias dan konsisten dalam menggunakan gas LPG yang disebabkan penggunaan gas LPG lebih bersih, aman dan lebih tahan lama dibanding dengan minyak tanah.

Menurut Juliadi selaku Pedagang Gas LPG pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018 mengatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut terlihat dari jumlah pengguna gas mengalami peningkatan. Hampir semua masyarakat yang dulu menggunakan minyak tanah sekarang sudah menggunakan gas dan masyarakat tetap konsisten dalam menggunakan gas .

Menurut Ibu Rini selaku masyarakat pengguna LPG dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018 mengatakan bahwa program yang dilakukan pemerintah sudah berjalan baik. Karena penggunaan gas lebih mudah dan cepat sehingga tidak memerlukan waktu yang lebih lama. Program ini sangat membantunya sebagai Ibu Rumah Tangga.

Senada dengan Ibu Rini, pernyataan Ibu Yuniati selaku masyarakat pengguna LPG 3 kg dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018 mengatakan bahwa program diversifikasi energi sudah berjalan dengan baik. Karena penggunaan gas lebih mudah atau bisa dikatakan efektif dan efisien. Hal tersebut merupakan program yang bagus. Karena dalam penggunaan gas dirasakan lebih hemat sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya rumah tangga.

Lalu Ibu Tuti selaku masyarakat pengguna gas LPG mengatakan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret bahwa pelaksanaan program program sudah berjalan dengan baik. Karena yang sebelumnya pengguna minyak tanah dan sekarang beralih menjadi pengguna gas sangat merasakan dampak positifnya. Hal yang paling terasa adalah penggunaannya yang mudah dan harga yang terjangkau.

Dapat disimpulkan bahwa program yang akan dilaksanakan di Kecamatan Medan Timur dapat tercapai, ini dibuktikan dengan hampir keseluruhan masyarakat sudah menggunakan gas dan tetap konsisten dalam menggunakan gas bahkan jumlah pengguna gas selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat dapat merasakan dampak positifnya menggunakan gas dibanding dengan menggunakan minyak tanah.

3. Adanya Target Yang Akan Dicapai

Dalam target pendistribusian LPG secara terpadu, transparan, akuntabel, kompetitif dan adil diperlukannya peran pemerintah dalam hal pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rislan Indra, selaku kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018 menyatakan bahwa target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih mengalami keluhan harga gas LPG 3 kg yang terlalu mahal ditingkat eceran dan terkadang harga yang tidak sama di beberapa tempat penjualan. Sehingga masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan harga subsidi tidak bisa mendapatkan hak nya. Hal tersebut dikarenakan harga subsidi gas LPG 3 kg hanya sampai di Pangkalan Gas LPG sehingga jika membeli gas di pedagang eceran harganya tidak lagi dengan subsidi. Jumlah pangkalan yang masih sedikit di Kecamatan Medan Timur mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak dapat membeli gas dengan harga yang disubsidi pemerintah. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perdagangan sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina untuk menambah jumlah pangkalan gas. Kemudian belum dilaksanakannya sistem pendistribusian LPG tertutup juga mengakibatkan hal tersebut. Karena dalam peraturan sistem pendistribusian LPG tertutup mengharuskan pembeli gas LPG 3 kg harus rakyat miskin dan usaha mikro, namun saat ini penjualan gas LPG 3 kg bebas dilakukan kepada semua kalangan.

Selanjutnya Ibu Sunata selaku seksi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri menjelaskan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018 mengatakan bahwa target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih saja mendapati harga gas LPG 3

kg yang terlalu mahal dari biasanya. Padahal masyarakat miskin seharusnya mendapatkan Subsidi dari pemerintah. Hal tersebut dikarenakan gas LPG 3 kg tidak didistribusikan secara tertutup atau tidak dibatasi hanya untuk masyarakat miskin dan usaha mikro. Sehingga gas yang seharusnya untuk masyarakat miskin habis tidak tepat pada sasarannya.

Menurut Bapak Wahyu Apriliyanto selaku Junior Officer Operation Planning & Transportation dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 maret 2018 mengatakan bahwa target yang akan dicapai dari Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 berjalan dengan baik. Namun masih ada keluhan dari masyarakat karena tidak meratanya harga gas LPG 3 kg. Hal tersebut karena harga gas LPG 3 kg yang bersubsidi hanya sampai di pangkalan, sehingga harga gas yang di eceran tidak lagi dengan harga subsidi dan jumlah pangkalan gas LPG jumlahnya masih sedikit. Adapun upaya yang akan dilakukan Pertamina yaitu dengan melakukan pemerataan jumlah pangkalan LPG.

Menurut Bapak Juliadi Ginting selaku Pedagang Gas LPG pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018 mengatakan bahwa target yang akan dicapai belum terkasana dengan baik . Hal tersebut dikarenakan banyak pedagang yang membeli gas dengan jumlah yang banyak sehingga masyarakat/ibu rumah tangga yang memerlukan gas LPG 3 kg tidak dapat membeli gas LPG 3 kg.

Menurut Ibu Rini selaku masyarakat pengguna LPG dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018 mengatakan bahwa target yang akan

dicapai tidak berjalan dengan baik . Karena sering membeli gas LPG 3 kg dengan harga yang cukup mahal dikarenakan persediaan gas LPG 3 kg sudah habis dan harus membeli gas LPG 3kg di pedagang eceran.

Kemudian pernyataan Ibu Yuniati selaku masyarakat pengguna LPG 3 kg dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018 mengatakan bahwa target yang akan dicapai pemerintah sudah terlaksana dengan baik. Karena harga gas yang cukup terjangkau dan mudah didapat sehingga dapat mempermudah aktivitasnya sebagai pedagang makanan.

Lalu Ibu Tuti selaku pengguna LPG mengatakan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret bahwa target yang akan dicapai belum terlaksana dengan baik. Karna sering membeli gas elpiji dengan harga yang tinggi dan terkadang sulit mendapatkan gas LPG 3 kg sehingga dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar gas untuk berdagang harus mencari jauh-jauh dari rumah dan memerlukan biaya tambahan untuk membayar ongkos kendaran lagi.

Dapat disimpulkan bahwa target yang akan dicapai tidak berjalan dengan baik. Sehingga perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dan pihak dinas sudah melakukan Koordinasi dengan Pertamina untuk melakukan pendataan jumlah pangkalan di Kecamatan Medan Timur untuk melakukan pemerataan jumlah Pangkalan gas LPG. Dan diharapkan dapat melaksanakan Sistem pendistribusian LPG tertutup sesegera mungkin.

4. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

Pengawasan adalah kegiatan penguasaan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ketempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan dari pelaksana. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri, proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, oleh karena itu setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rislan Indra, selaku kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018 menyatakan pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang telah diterbitkan sudah berjalan dengan baik dengan melakukan pemantauan langsung ke lapangan dapat menekan tingkat kecurangan pedagang yang nakal yang dapat merugikan masyarakat pengguna gas LPG sehingga kepercayaan masyarakat dalam menggunakan LPG tetap baik.

Selanjutnya ibu Sunata selaku seksi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri menjelaskan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018 mengatakan pengawasan terhadap kebijakan yang telah diterbitkan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak adanya masyarakat yang mengeluh tentang kerugian atas gas LPG yang diakibatkan

keurngan pedagang maupun karna produk gas LPG yang bermasalah. Hal ini merupakan hal yang baik karena dengan cara pengawasan yang telah terlaksana dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan dan konsistensi masyarakat dalam menggunakan gas LPG.

Menurut Bapak Wahyu Apriliyanto selaku Junior Officer Operation Planning & Transportation dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 maret 2018 mengatakan bahwa pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan dari Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 berjalan dengan baik. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengawasan yaitu pendistribusian yang luas sehingga sulit melakukan pengawasan. Dalam melakukan pengawasan pertamina melakukan pengawasan secara langsung dan sistem.

Menurut Bapak Herman Ginting selaku Pedagang Gas LPG pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018 mengatakan bahwa pengawasan terhadap kebijakan yang telah diterbitkan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut tersebut dapat dirasakan dari konsistensi tim pengawas yang melakukan pengecekan langsung tiap bulannya ke pangkalan. Kemudian tim pengawas melakukan pengecekan data-data laporan dari pangkalan yang dilaporkan tiap bulannya.

Menurut Ibu Rini selaku masyarakat pengguna LPG dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018 mengatakan bahwa pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut

dikarenakan dalam setiap penggunaan gas LPG tidak mengalami masalah dan tidak mengalami kerugian dikarenakan masalah pada gas.

Kemudian pernyataan Ibu Yuniati selaku masyarakat pengguna LPG 3 kg dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Februari 2018 mengatakan bahwa pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan dengan baik. Karena selama ini tidak pernah mengalami keurangan maupun kerugian dalam menggunakan gas LPG.

Lalu Ibu Tuti mengatakan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Maret bahwa pengawasn terhdap kebijakan yang diterbitkan sudh berjalan dengan baik. Karena tidak pernah mengalami penipuan yang diakibatkan kenakalan pedagang gas LPG sehingga menambah keberayaannya bahwa penggunaan gas LPG layak dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan berjalan dengan baik. Sehingga kepercayaan masyarakat dalam menggunakan gas LPG tetap terjaga dan dapat mendukung program diversifikasi dengan baik.

C. Pembahasan

1. Adanya Tujuan Yang Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, Kebijakan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG Dalam Rangka Mendukung Program

Diversifikasi Energi Di Kecamatan Medan Timur dengan adanya tujuan yang dicapai telah terlaksana. Namun demikian masih perlu adanya perbaikan sistem distribusi karena masih ada terjadi kelangkaan LPG.

Distribusi merupakan suatu proses kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Jadi distribusi adalah kegiatan usaha yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat dibutuhkan).

Dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG berjalan dengan baik. Dengan keadaan tersebut diperlukan pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup agar pendistribusian LPG 3 kg berjalan dengan baik gas.

2. Adanya Program yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG Dalam Rangka Mendukung Program Diversifikasi Energi Di Kecamatan Medan Timur, dengan adanya program yang dilaksanakan dapat dikatakan berhasil. Ini dibuktikan dengan tingkat penggunaan gas yang tinggi atau hampir seluruh masyarakat yang sebelumnya menggunakan minyak tanah beralih menggunakan gas.

Dengan adanya Peraturan Menteri tersebut dapat mengurangi jumlah masyarakat pengguna bahan bakar fosil. Sehingga ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar yang tidak terbaharukan mulai berkurang

3. Adanya Target Yang Akan Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG Dalam Rangka Mendukung Program Diversifikasi Energi Di Kecamatan Medan Timur dengan adanya target yang akan dicapai belum tercapai karena belum meratanya jumlah pangkalan gas LPG di Kecamatan Medan Timur . Pemerintah melalui Dinas Perdagangan melakukan kerja sama dengan melakukan pendataan jumlah pangkalan gas LPG dan akan melakukan pemerataan jumlah pangkalan LPG dapat meratakan harga LPG 3 kg. Kemudian perlunya pelaksanaan sesegera mungkin sistem pendistribusian LPG tertutup agar tidak terjadi lagi masalah-masalah pendistribusian.

Hal ini sesuai dengan dengan pendapat Knoepfel (2007:10) menjelaskan kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur di antara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespon, mengidentifikasi dan memecahkan masalah secara politis didefinisikan sebagai masalah publik.

Adanya target yang akan dicapai merupakan fokus utama dalam suatu kebijakan karena itu dibutuhkan alternatif alternatif yang dilakukan yang

dilakukan Pemerintah untuk selalu berusaha agar ditahun berikutnya target akan tercapai dari pada tahun sebelumnya. Dengan melakukan pemertaan jumlah pangkalan gas maka harga pemasaran gas LPG 3 kg akan merata harga nya sesuai dengan harga subsidi.

4. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG Dalam Rangka Mendukung Program Diversifikasi Energi Di Kecamatan Medan Timur, dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan yang telah terlaksanakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan bahwa masyarakat Medan Timur selama menggunakan gas LPG tidak mengalami permasalahan atau kerugian yang berarti.

Dengan melakukan pengawasan yang konsisten dan tegas terhadap sistem pendistribusian gas LPG dapat menghindarkan permasalahan yang diakibatkan kelalaian dan kenakalan dalam sistem distribusi gas LPG sehingga rasa percaya dan keamanan masyarakat dalam menggunakan gas LPG tetap terjaga. Dengan keadaan tersebut diharapkan dapat mendukung terlaksananya program diversifikasi energi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG Dalam Rangka Mendukung Program Diversifikasi Energi Di Kecamatan Medan Timur telah berjalan dengan baik, namun masih perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG, hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Tujuan yang akan dicapai dalam Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG Dalam Rangka Mendukung Program Diversifikasi Energi Di Kecamatan Medan Timur telah terlaksana dengan baik, namun belum sepenuhnya. Itu di buktikan dengan masih adanya keadaan kelangkaan LPG 3 kg.
2. Program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik yaitu berjalannya program diversifikasi dengan mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas (LPG). Kemudian hal tersebut diperkuat dengan tingginya permintaan gas dan tetap konsistennya masyarakat dalam menggunakan gas LPG.

3. Target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena jumlah pangkalan gas yang ada di Kecamatan Medan Timur tidak merata ataupun masih kurang. Sehingga mengakibatkan masyarakat kurang miskin tidak mendapatkan harga gas LPG 3 kg dengan harga yang tidak bersubsidi karena harus membeli di pedagang eceran. Seperti diketahui harga gas LPG 3 kg yang bersubsidi hanya sampai di pangkalan saja.
4. Pengawasan terhadap kebijakan berjalan dengan baik karena pengawasan yang dilakukan berjalan secara konsisten tiap bulan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya pengaduan dari Masyarakat Medan Timur yang dikarenakan akibat dari kecurangan pedagang atau permasalahan pada gas LPG yang digunakan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG Dalam Rangka Mendukung Program Diversifikasi Energi Di Kecamatan Medan Timur.

1. Adanya tujuan yang dicapai telah terimplementasikan dengan baik tetapi masih kurang maksimal, maka perlu menyegerakan pelaksanaan sistem distribusi LPG tertutup, guna menepatkan sasaran pengguna

LPG 3 kg untuk masyarakat miskin dan usaha mikro sehingga tidak terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg.

2. Adanya program yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dengan Pertamina sudah sesuai dengan yang diinginkan, tetapi harus juga lebih ditingkatkan lagi.
3. Adanya target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik. Maka pemerintah harus cepat tanggap untuk melakukan pendataan pangkalan LPG dan menambah jumlah pangkalan LPG agar masyarakat miskin dapat mendapatkan haknya untuk membeli gas LPG 3 kg yang disubsidi.
4. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan dengan baik, namun harus ditingkatkan lagi pengawasannya agar tidak ada terjadi permasalahan dalam pendistribusian gas LPG.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Alma.1991. *Saluran Pemasaran:Konsep & Strategi Analisa Kuantitatif, cetakan 4*. Penerbit BPF: Yogyakarta
- Anderson . 2005. *Kebijakan dan KebijakanPublik*. Bandung.
- Daniel. 1999. *Manajemen Pemasaran, cetakan 5*. Penerbit BPFE: Yogyakarta
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Edward, 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung
- Hartotono. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media pressindo
- Indriyo. 1999. *Pemasaran: Prinsip dan Kasus, cetakan 4*, Penerbit BPFE . Yogyakarta
- Jones. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Jenkins.1978. *Politics and policy Implementation in the third World*. New Jersey
- Kotler. 1990. *Manajemen Pemasaran, edisi ke-4*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Keller.2004. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi* . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Knoepfel, 2007. *Kebijakan Publik*. Jakarta:Mandar Maju.

- Mazmanian, 2005. *Understanding Publik Policy*. Person Education Inc: New Jersey.
- Meter. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Repika Aditama.
- Maleong, Lexy. 2004. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
- Siahaya Willem. 2013. *Manajemen Pengadaan*. Bandung. Alfabeta
- Sunyoto, Danang. 2015. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta. PT BukuSeru.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijan Publik*. Bandung: Trun RTH.
- Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik.
- Tjiptono. 1997. *Strategi Pemasaran, Edisi ke-2, cetakan ke-1*, Penerbit Andi: Yogyakarta
- Wahab. 1991. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Wayne, 1976. *Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Weele. 2009. *Purchasing and Supply Chain Management*. Mandar Maju. Bandung
- Weimer. 2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Williams. 1971. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Mandar Maju
- Winarmo, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media pressindo
- Zainal, 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no 26 tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Lpg

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakt/article/view/788> (29 Desember 2017)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmad Ilhamsyah Rambe
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Durian, 20 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Bukit Siguntang No.4 Kelurahan Gelurur Darat II
Anak ke : 3 dari 4 bersaudara
Nama Orang Tua
Nama Ayah : Azis Salim Rambe
Nama Ibu : Nambin Nasution
Alamat : Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualuh Selatan.

PENDIDIKAN

1. Tahun 2002-2008 SD NEGERI 117850
2. Tahun 2008-2011 SMP NEGERI 1 KUALUH SELATAN
3. TAHUN 2011-2014 SMA NEGERI 1 KUALUH SELATAN
4. Tahun 2014 sampai dengan sekarang masih tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Penulis

Rahmad Ilhamsyah Rambe

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Nama :

Umur :

Jabatan :

1. Adanya Tujuan Yang Dicapai

- a. Menurut Bapak apakah pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna LPG ?

Jawab :

- b. Jika belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kenapa?

Jawab :

- c. Lalu bagaimana penanganan yang dilakukan mengenai masalah tersebut ?

Jawab :

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

- a. Bagaimana Program Diversifikasi yang dilaksanakan saat ini ?

Jawab :

- b. Mengapa masyarakat antusias dalam mengikuti program diversifikasi energi ?

Jawab :

- c. Apakah masyarakat tetap konsisten dalam menggunakan gas?

Jawab :

3. Adanya Target Yang Dicapai

- a. Apakah target yang akan dicapai terlaksana dengan baik?

Jawab :

b. Jika target yang akan dicapai belum terlaksana dengan baik, mengapa?

Jawab :

c. Apa yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah dalam pencapaian target?

Jawab :

4. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap distribusi LPG?

Jawab :

b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan distribusi gas LPG?

Jawab :

c. Menurut bapak/Ibu bagaimana hasil evaluasi dari pengawasan yang dilakukan?

Jawab :

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Nama : Rislal S.I.P

Umur : 51 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

1. Adanya Tujuan Yang Dicapai

- a. Menurut Bapak apakah pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna LPG ?

Jawab : sudah, pelaksanaan peraturan tersebut tidak bisa dikatakan sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna LPG. Dibuktikan dengan masih terjadinya kelangkaan LPG yang terkadang meresahkan masyarakat.

- b. Jika belum/sudah memenuhi kebutuhan masyarakat, kenapa?

Jawab : Hal tersebut karena belum terlaksananya sistem pendistribusian LPG tertutup. Yang mengharuskan masyarakat yang menggunakan LPG 3 kg harus masyarakat miskin dan usaha mikro.

- c. Lalu bagaimana penanganan yang dilakukan Dinas Perdagangan mengenai masalah tersebut ?

Jawab : untuk jangka pendek Dinas Perdagangan bekerjasama dengan Pertamina dengan melakukan Operasi pasar LPG 3 kg. Untuk jangka panjang sedang dilakukan persiapan pelaksanaan sistem pendistribusian LPG tertutup.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

- a. Bagaimana Program Diversifikasi yang dilaksanakan saat ini ?

Jawab : Program yang diversifikasi saat ini berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hampir keseluruhan masyarakat pengguna minyak tanah beralih menggunakan gas .

b. Mengapa masyarakat antusias dalam mengikuti program diversifikasi energi ?

Jawab : Hal tersebut dirasakan masyarakat dalam penggunaan LPG lebih efektif dan efisien atau bahasa sederhananya mudah dan cepat.

c. Apakah masyarakat tetap konsisten dalam menggunakan gas?

Jawab : Masyarakat masih tetap menggunakan gas dan antusias dalam menggunakan gas.

3. Adanya Target Yang Akan Dicapai

a. Apakah target yang akan dicapai terlaksana dengan baik?

Jawab : Target yang akan dicapai belum terlaksana dengan baik. Karena masih banyaknya keluhan masyarakat untuk mendapatkan gas LPG 3 kg dengan harga bersubsidi.

b. Jika target yang akan dicapai belum terlaksana dengan baik, mengapa?

Jawab : Karena jumlah pangkalan gas masih sedikit di Kecamatan Medan Timur. Sehingga untuk mendapatkan gas 3 kg dengan harga subsidi sulit didapat.

c. Apa yang dilakukan Dinas Perdagangan dalam menyelesaikan masalah dalam pencapaian target?

Jawab : Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Pertamina untuk melakukan pendataan pangkalan dan akan melakukan penambahan pangkalan secara merata.

4. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

a. Menurut Bapak bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap distribusi LPG?

Jawab : Pelaksanaan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG terlaksana dengan baik. Karena tidak ada laporan dari masyarakat tentang permasalahan kerusakan produk gas atau kecurangan.

b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan distribusi gas LPG?

Jawab : tidak ada kendala yang berarti dalam pengawasan distribusi gas LPG.

c. Menurut bapak bagaimana hasil evaluasi dari pengawasan yang dilakukan

Jawab : Perlu adanya peningkatan pengawasan agar tidak ada celah untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dal proses distribusi gas LPG.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Nama : Wahyu Apriliyanto

Umur : 23 Tahun

Jabatan : Junior Officer Operation Planning & Transportation

1. Adanya Tujuan Yang Dicapai

- a. Menurut Bapak apakah pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna LPG ?

Jawab : sudah

- b. Jika belum/sudah memenuhi kebutuhan masyarakat, kenapa?

Jawab : Sudah terpenuhi karena setiap masyarakat yang membutuhkan gas LPG dapat membeli di pedagang eceran dan Pangkalan. Meski terkadang masih terjadi kesulitan namun jarang terjadi.

- c. Lalu bagaimana penanganan yang dilakukan Pertamina mengenai masalah tersebut ?

Jawab : melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

- a. Bagaimana Program Diversifikasi yang dilaksanakan saat ini ?

Jawab : Program yang diversifikasi saat ini berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hampir keseluruhan masyarakat pengguna minyak tanah beralih menggunakan gas .

- b. Mengapa masyarakat antusias dalam mengikuti program diversifikasi energi ?

Jawab : karena masyarakat merasa bahwa penggunaan gas LPG lebih bersih, tahan lama dan aman.

c. Apakah masyarakat tetap konsisten dalam menggunakan gas?

Jawab : Masyarakat masih tetap menggunakan gas dan antusias dalam menggunakan gas.

3. Adanya Target Yang Akan Dicapai

a. Apakah target yang akan dicapai terlaksana dengan baik?

Jawab : sudah, tetapi masih ada keluhan dari masyarakat

b. Jika target yang akan dicapai belum terlaksana dengan baik, mengapa?

Jawab : Karena jumlah pangkalan gas masih sedikit di Kecamatan Medan Timur. Sehingga untuk mendapatkan gas 3 kg dengan harga subsidi sulit didapat.

c. Apa yang dilakukan Pertamina dalam menyelesaikan masalah dalam pencapaian target?

Jawab : Melakukan pemerataan jumlah pangkalan.

4. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

a. Menurut Bapak bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap distribusi LPG?

Jawab : Pelaksanaan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG terlaksana dengan baik.

b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan distribusi gas LPG?

Jawab : karena pendistribusian yang luas mengakibatkan sulit melakukan pengawasan.

c. Menurut bapak bagaimana hasil evaluasi dari pengawasan yang dilakukan

Jawab : perlu adanya pembuatan sistem pengawasan yang lebih baik.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Nama : Sunata, SE

Umur : 38

Jabatan : Seksi Penggunaan dan Pemasaran Dalam Negeri

1. Adanya Tujuan Yang Dicapai

- a. Menurut Ibu apakah pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna LPG ?

Jawab : sudah. Namun masih perlu lagi melaksanakan sistem pendistribusian tertutup

- b. Jika belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kenapa?

Jawab : Hal tersebut dominan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan pelaksanaan peraturan menteri tersebut, namun masih terjadi kelangkaan LPG 3 kg meski tidak terlalu sering.

- c. Lalu bagaimana penanganan yang dilakukan Dinas Perdagangan mengenai masalah tersebut ?

Jawab : untuk mencegah hal tersebut perlu disegerakan pelaksanaan sistem pendistribusian LPG tertutup.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

- a. Bagaimana Program Diversifikasi yang dilaksanakan saat ini ?

Jawab : Program yang diversifikasi saat ini berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan hampir keseluruhan masyarakat pengguna minyak tanah beralih menggunakan gas .

- b. Mengapa masyarakat antusias dalam mengikuti program diversifikasi energi ?

Jawab : karena menurut masyarakat bahwa penggunaan gas LPG lebih hemat atau terjangkau.

c. Apakah masyarakat tetap konsisten dalam menggunakan gas?

Jawab : hingga saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan gas LPG dibanding menggunakan minyak tanah.

3. Adanya Target Yang Akan Dicapai

a. Apakah target yang akan dicapai terlaksana dengan baik?

Jawab : target yang dicapai belum berjalan dengan baik.

b. Jika target yang akan dicapai belum terlaksana dengan baik, mengapa?

Jawab : karena gas LPG 3 kg tidak di distribusikan secara tertutup atau tidak dibatasi hanya untuk masyarakat miskin, sehingga yang seharusnya untuk masyarakat miskin habis tidak tepat pada sasaran.

c. Apa yang dilakukan Dinas Perdagangan dalam menyelesaikan masalah dalam pencapaian target?

Jawab : perlunya pelaksanaan sistem pendistribusian gas LPG secara tertutup.

4. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

a. Menurut Ibu bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap distribusi LPG?

Jawab : pengawasan yang dilakukan berjalan dengan baik.

b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan distribusi gas LPG?

Jawab : tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan pengawasan.

c. Menurut bapak bagaimana hasil evaluasi dari pengawasan yang dilakukan

Jawab : menjaga konsistensi pengawasan agar kepercayaan masyarakat terhadap gas LPG terjaga.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Nama : Juliadi

Umur : 42 Tahun

Jabatan : Pedagang Gas LPG (pangkalan)

1. Adanya Tujuan Yang Dicapai

- a. Menurut Bapak apakah pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna LPG ?

Jawab : terlaksana dengan baik. Namun saya masih terjadi kehabisan stok gas LPG 3 kg, sehingga masyarakat sering mengeluh karna sulit mendapatkan gas .

- b. Jika sudah atau belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kenapa?

Jawab : karena masyarakat tidak mampu tidak mendapatkan gas LPG 3 kg yang bersubsidi disebabkan bebasnya penjualan tanpa membatasi dengan masyarakat yang kaya.

- c. Lalu bagaimana cara yang dilakukan dalam menghadapi mengenai masalah tersebut ?

Jawab : Langsung melapor ke pihak agen untuk segera mengantar pasokan gas.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

- a. Bagaimana Program Diversifikasi yang dilaksanakan saat ini ?

Jawab : programnya berjalan dengan baik, karena pengguna minyak tanah semakin berkurang .

- b. Mengapa masyarakat antusias dalam mengikuti program diversifikasi energi ?

Jawab : karena dalam menggunakan gas lebih hemat dan harganya murah.

- c. Apakah masyarakat tetap konsisten dalam menggunakan gas?

Jawab : ya, masyarakat tetap menggunakan gas .

3. Adanya Target Yang Akan Dicapai

- a. Apakah target yang akan dicapai pemerintah tentang pemerataan harga terlaksana dengan baik?

Jawab : target yang dicapai belum berjalan dengan baik.

- b. Jika target yang akan dicapai belum terlaksana dengan baik, mengapa?

Jawab : karena banyak pembeli yang membeli gas lebih dari satu tabung.

- c. Apa yang akan anda lakukan dalam menghadapi masalah tersebut ?

Jawab : selalu mengingatkan masyarakat untuk membeli gas hanya satu tabung saja

4. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

- a. Menurut Bapak bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap distribusi LPG?

Jawab : pengawasan yang dilakukan berjalan dengan baik.

- b. Apa saja pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas?

Jawab : dengan cara memeriksa buku laporan penjualan dan melihat keadaan langsung.

- c. Menurut bapak bagaimana dampak dari pengawasan yang dilakukan

Jawab : masyarakat tetap percaya terhadap gas LPG.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Nama : Rini

Umur : 51 Tahun

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

1. Adanya Tujuan Yang Dicapai

- a. Menurut Ibu apakah pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 dapat memenuhi kebutuhan terhadap gas anda ?

Jawab : sudah

- b. Jika belum atau sudah memenuhi kebutuhan masyarakat, kenapa?

Jawab : karena selama penggunaan elpiji, saya jarang mengalami kesulitan untuk mendapatkan gas LPG.

- c. Lalu bagaimana yang anda lakukan jika mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan gas anda ?

Jawab : berusaha untuk mencari di toko atau pangkalan lain.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

- a. Apakah merubah penggunaan minyak tanah menjadi gas merupakan program yang baik ?

Jawab : ya .

- b. Mengapa masyarakat antusias dalam mengikuti program diversifikasi energi ?

Jawab : karena penggunaan gas LPG lebih hemat atau terjangkau.

- c. Apakah ibu akan tetap menggunakan lpg?

Jawab : ya

3. Adanya Target Yang Akan Dicapai

a. Apakah ibu dalam membeli gas mengalami keluhan dengan harga?

Jawab : tidak, karena saya tidak pernah mengalami kesulitan dalam memperoleh gas LPG

b. Apa yang ibu lakukan jika mengalami keluhan dengan harga?

Jawab :

c. Apa harapan ibu tentang masalah yang hadapi?

Jawab :

4. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

a. apakah ibu pernah mengalami kerugian setelah menggunakan gas?

Jawab : tidak

b. Apakah pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap peredaran gas sudah baik?

Jawab : sudah

c. menurut Ibu apakah perlu perbaikan lagi dalam pendistribusian gas LPG?

Jawab : ya.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Nama : Tuti

Umur : 53 Tahun

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

1. Adanya Tujuan Yang Dicapai

- a. Menurut Ibu apakah pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 dapat memenuhi kebutuhan terhadap gas anda ?

Jawab : sudah terlaksana dengan baik.

- b. Jika sudah atau belum memenuhi kebutuhan anda, kenapa?

Jawab : karena selama menggunakan gas lpg tidak terjadi kendala apapun.

- c. Lalu bagaimana yang anda lakukan jika mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan gas anda ?

Jawab : saya mencari gas di kedai yang berada jauh dari rumah atau bahkan kecamatan lain.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

- a. Apakah merubah penggunaan minyak tanah menjadi gas merupakan program yang baik ?

Jawab : ya .

- b. Mengapa masyarakat antusias dalam mengikuti program diversifikasi energi ?

Jawab : karena penggunaan gas LPG lebih hemat atau terjangkau.

- c. Apakah ibu akan tetap menggunakan lpg?

Jawab : ya

3. Adanya Target Yang Akan Dicapai

a. Apakah ibu dalam membeli gas mengalami keluhan dengan harga?

Jawab : ya. Karena jika membeli di pengecer harganya lebih mahal dibandingkan di pangkalan dan jika ada kelangkaan harganya melambung.

b. Apa yang ibu lakukan jika mengalami keluhan dengan harga?

Jawab : mencari ke penjual yang menjual gas dengan harga yang relatif masih murah.

c. Apa harapan ibu tentang masalah yang hadapi?

Jawab : agar diperbanyak pangkalan gas LPG.

4. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

a. apakah ibu pernah mengalami kerugian setelah menggunakan gas?

Jawab : tidak

b. Apakah pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap peredaran gas sudah baik?

Jawab : sudah

c. menurut Ibu apakah perlu perbaikan lagi dalam pendistribusian gas LPG?

Jawab : ya.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Nama : Yuniati

Umur : 41 Tahun

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

1. Adanya Tujuan Yang Dicapai

- a. Menurut Ibu apakah pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 dapat memenuhi kebutuhan terhadap gas anda ?

Jawab : belum terlaksana dengan baik.

- b. Jika belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kenapa?

Jawab : Karena masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg

- c. Lalu bagaimana yang anda lakukan jika mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan gas anda ?

Jawab : saya mencari gas di toko/kedai yang berada jauh dari rumah atau bahkan kecamatan lain.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

- a. Apakah merubah penggunaan minyak tanah menjadi gas merupakan program yang baik ?

Jawab : ya .

- b. Mengapa Ibu antusias dalam mengikuti program diversifikasi energi ?

Jawab : karena penggunaan gas LPG lebih hemat atau terjangkau.

- c. Apakah ibu akan tetap menggunakan lpg?

Jawab : ya

3. Adanya Target Yang Akan Dicapai

a. Apakah ibu dalam membeli gas mengalami keluhan dengan harga?

Jawab : ya. Karena jika membeli di pengecer harganya lebih mahal dibandingkan di pangkalan

b. Apa yang ibu lakukan jika mengalami keluhan dengan harga?

Jawab : mencari ke penjual yang menjual gas dengan harga yang relative masih murah.

c. Apa harapan ibu tentang masalah yang hadapi?

Jawab : agar diperbanyak pangkalan gas LPG.

4. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

a. apakah ibu pernah mengalami kerugian setelah menggunakan gas?

Jawab : tidak

b. Apakah pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap peredaran gas sudah baik?

Jawab : sudah

c. menurut Ibu apakah perlu perbaikan lagi dalam pendistribusian gas LPG?

Jawab : ya.